



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KEBIJAKAN DID 2021



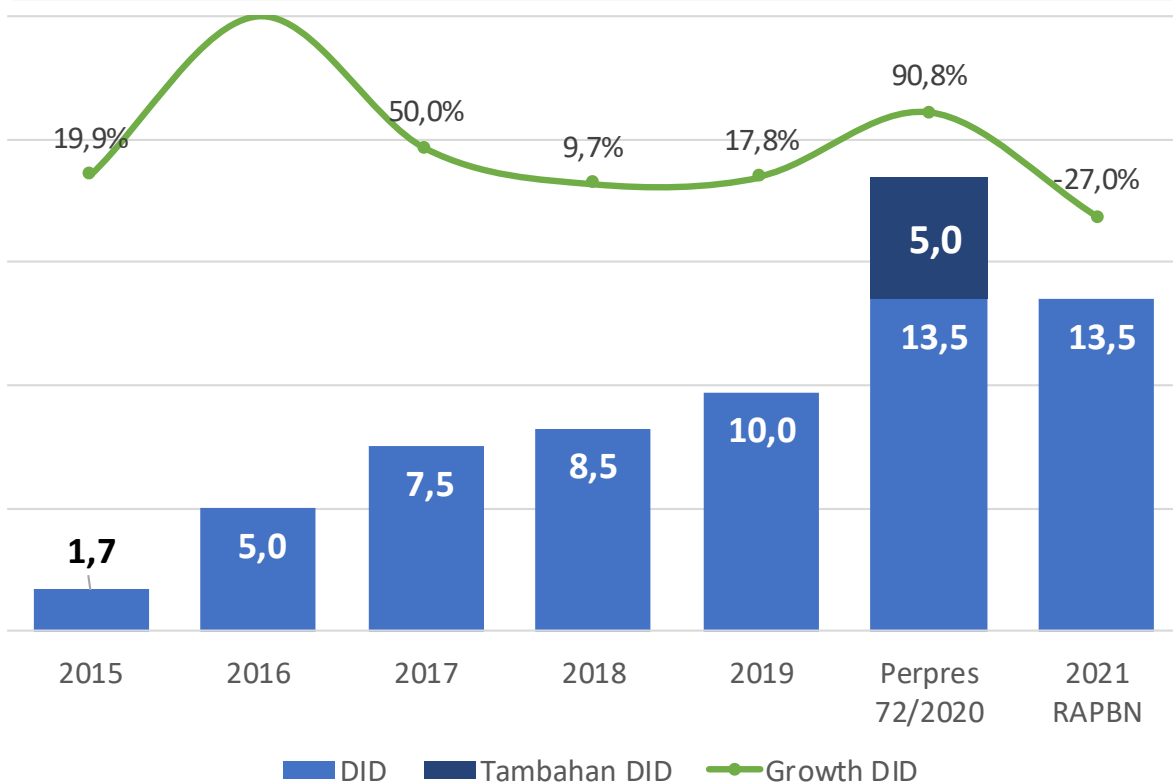
KEBIJAKAN DID TA 2021

Efektifitas dan efisiensi penggunaan DID dan Penyempurnaan formulasi DID (RPJMN 2020 – 2024)



Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah

Dana Insentif Daerah, 2015-2021



- Mengedepankan **kriteria kinerja yang dinamis dan strategis** untuk mendorong daerah lebih kompetitif, seperti penurunan angka pengangguran, kinerja pengendalian inflasi, indeks pencegahan korupsi
- Menyederhanakan dan menjaga konsistensi formula DID
- Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD
- Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional
- Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional
- Mengalokasikan sebagian DID pada tahun berjalan dengan menggunakan data kinerja tahun berjalan/termutakhir dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah
- Penggunaan DID:
 - ✓ Digitalisasi pelayanan bidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - ✓ Pemulihan ekonomi termasuk pemberdayaan UMKM, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan

INDIKATOR DID 2020 – DID 2021



Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan **insentif/penghargaan** kepada daerah atas **kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja** di bidang **tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat**

Kriteria Utama

2020

- Opini BPK atas LKPD (WTP)
- Penetapan Perda APBD tepat waktu
- Penggunaan e-Government (*e-budgeting* dan *e-procurement*)

Kategori Kinerja

- 1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah**
 - a. Kemandirian Daerah
 - b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah
 - c. Creative Financing
 - d. Mandatory spending
 - e. Ketepatan waktu pelaporan
- 2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan**
 - a. Angka Partisipasi Murni
 - b. Peta Mutu Pendidikan
 - c. Rata-rata Nilai Ujian Nasional
- 3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan**
 - a. Penanganan *Stunting* (*Baduta*)
 - b. Baduta yang mendapatkan imunisasi lengkap
 - c. Persalinan di fasilitas kesehatan
- 4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur**
 - a. Akses sanitasi Layak
 - b. Sumber air minum layak
- 5. Kesejahteraan Masyarakat**
 - a. Penurunan Penduduk Miskin
 - b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 6. Pelayanan Umum Pemerintahan**
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - b. Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - d. Inovasi Pemerintah Daerah
7. Peningkatan ekspor
8. Peningkatan Investasi
9. Pengelolaan Sampah plastik

Kriteria Utama

2021

- Opini BPK atas LKPD (WTP)
- Penetapan Perda APBD tepat waktu
- Penggunaan e-Government (*e-budgeting*, dan *e-procurement*)

Kategori Kinerja

- 1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah**
 - a. Kemandirian Daerah
 - b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah
 - c. **Sistem Informasi Keuangan Daerah (baru)**
- 2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan**
 - a. Angka Partisipasi Murni
 - b. Peta Mutu Pendidikan
- 3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan**
 - a. Penanganan *Stunting* (*Balita*)
 - b. Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
 - c. Persalinan di fasilitas kesehatan
- 4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur**
 - a. Akses sanitasi Layak
 - b. Sumber air minum layak
- 5. Kesejahteraan Masyarakat**
 - a. Penurunan Penduduk Miskin
 - b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - c. **Penurunan Angka Pengangguran (baru)**
- 6. Pelayanan Umum Pemerintahan**
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - c. Penghargaan Pembangunan Daerah
 - d. Inovasi Daerah
7. Peningkatan ekspor
8. Peningkatan Investasi
9. Pengelolaan Sampah
- 10. Pengendalian Inflasi Daerah (baru)**
- 11. Indeks Pencegahan Korupsi (baru)**

PENAMBAHAN INDIKATOR/VARIABEL DID 2021



No.	Kategori	Variabel	Keterangan
1	SIKD	Hasil penilaian diatas 95%	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong kinerja Pemda untuk melakukan pelaporan transaksi harian secara <i>real-time</i>• Penilaian dilakukan berdasarkan interkoneksi SIKD yang meliputi antara lain registrasi, status koneksi agen SIKD dan penyampaian data
2	Penurunan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Digunakan pada perhitungan DID TA 2021 untuk mendorong penurunan angka pengangguran selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020.
3	Pengendalian Inflasi Daerah	Penerima penghargaan TPID Award	Mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di daerah
4	Pencegahan Korupsi	Indeks Pencegahan Korupsi	<ul style="list-style-type: none">• Pencegahan korupsi di pemerintah daerah dilakukan melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan-korsupgah. KPK bersama kemendagri dan instansi lain mendampingi pemerintah daerah dalam pembangunan sistem, perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Sistem diimplementasikan untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana korupsi• Penilaian dilakukan berdasarkan capaian kemajuan implementasi perbaikan di perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, PTSP, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah manajemen asset daerah, tata Kelola desa

INDIKATOR YANG TIDAK DIGUNAKAN PADA 2021



Kategori	Variabel	Keterangan
Creative Financing	<ul style="list-style-type: none">• Penilaian hanya dilakukan terhadap Pemda yang melakukan pinjaman ke PT. SMI• Pemda yang melakukan pinjaman hanya sebanyak 29 Pemda	Indikator ini tidak digunakan dalam perhitungan alokasi DID 2021 karena tidak memenuhi azas <i>fairness</i> untuk semua daerah
Mandatory Spending	Merupakan kewajiban Pemda yang harus dipenuhi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan	Tidak digunakan Kembali dalam perhitungan alokasi DID 2021
Ketepatan Waktu Pelaporan	Merupakan kewajiban Pemda yang harus dipenuhi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan	Tidak digunakan kembali dalam perhitungan alokasi DID 2021
Rata-rata nilai Ujian Nasional	Data tidak tersedia karena tidak ada pelaksanaan UN pada tahun 2020	Tidak digunakan kembali dalam perhitungan alokasi DID 2021

SUMBER DATA PERHITUNGAN DID 2021



No	Jenis Data Kriteria Utama	Tahun	Sumber Data
1	Opini BPK atas LKPD	2019	BPK
2	Penetapan Perda APBD	2020	PEMDA
3	<i>e-budgeting</i>	2020	KEMENDAGRI
4	<i>e-procurement</i>	2019	LKPP

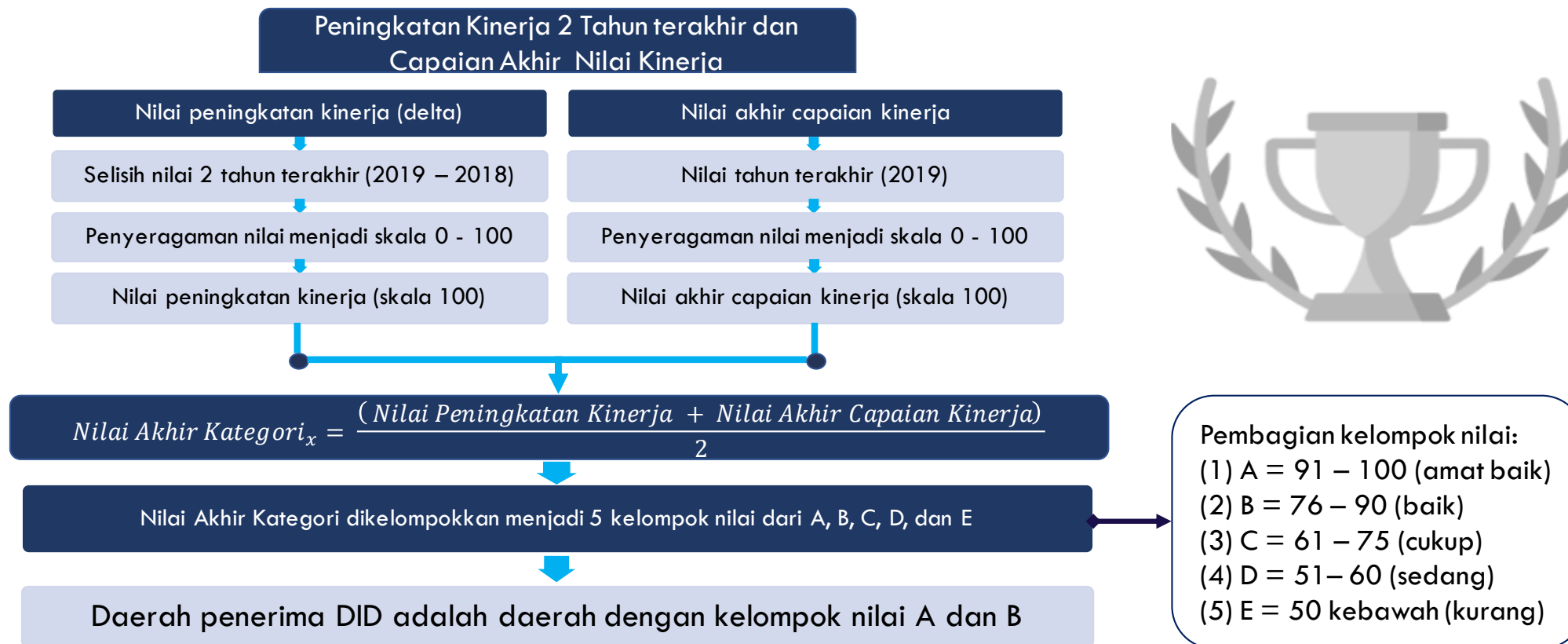
No	Jenis Data Kategori Kinerja	Tahun	Sumber Data
I. Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah			
1	APBD (Anggaran)	2018-2019	PEMDA
2	Realisasi APBD	2018-2019	PEMDA
3	PDRB Non Migas	2018-2019	BPS
4	SIKD	2020	KEMENKEU
II. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan			
1	Peta Mutu Pendidikan	2018-2019	KEMENDIKBUD
2	Angka Partisipasi Murni	2018-2019	BPS
III. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan			
1	Persentase Balita Stunting	2018-2019	KEMENKES
2	Persentase Balita Sudah Mendapatkan Imunisasi Lengkap	2018-2019	KEMENKES
3	Persentase Cakupan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan	2018-2019	BPS
IV. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur			
1	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	2018-2019	BPS
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	2018-2019	BPS

No	Jenis Data Kategori Kinerja	Tahun	Sumber Data
V. Kategori Kesejahteraan Masyarakat			
1	Persentase Penduduk Miskin	2018-2019	BPS
2	Indeks Pembangunan Manusia	2018-2019	BPS
3	Penurunan Angka Pengangguran	2018-2019	BPS
VI. Pelayanan Umum Pemerintahan			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2018-2019	KEMENDAGRI
2	Penghargaan Pembangunan Daerah	2020	BAPPENAS
3	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	2018-2019	KEMENPANRB
4	Inovasi Daerah	2020	KEMENPANRB/ KEMENDAGRI
VII. Peningkatan Ekspor		2018-2019	KEMENKEU
VIII. Peningkatan Investasi		2018-2019	BKPM
IX. Kategori Pengelolaan Sampah		2020	KLHK
X. TPID Award		2020	MENKO PEREKONOMIAN
XI. Indeks Pencegahan Korupsi		2018-2019	KPK

METODOLOGI PERHITUNGAN



- I. Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik, Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Investasi, Peningkatan Ekspor, Penyelenggaraan Pemerintahan, SAKIP, dan Indeks Pencegahan Korupsi didasarkan pada nilai peningkatan kinerja dan capaian akhir



- II. Kategori Penghargaan Pembangunan Daerah, Inovasi Daerah, TPID Award, dan Pengelolaan Sampah didasarkan pada hasil penilaian oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Instansi yang terkait

DAERAH PENERIMA ALOKASI



Alokasi DID diberikan kepada Daerah yang **memenuhi kriteria utama** dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

01

Pemerintah daerah yang memiliki nilai kinerja di atas batas nilai yang ditentukan (B) dari hasil penilaian peningkatan kinerja 2 tahun terakhir dan capaian kinerja tahun terakhir pada:

1. kelompok kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (selain kategori Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD);
2. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan;
3. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan;
4. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;
5. kelompok kategori kesejahteraan masyarakat;
6. kategori penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. kelompok kategori investasi;
9. kelompok kategori peningkatan ekspor; dan
10. kelompok kategori pencegahan korupsi.

02

Pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan/diusulkan dari Kementerian/Lembaga Negara pada:

1. kategori penghargaan pembangunan daerah;
2. kategori inovasi daerah;
3. kategori pengendalian inflasi; dan
4. kategori pengelolaan sampah.

03

Pemerintah daerah yang mendapatkan skor minimal 95 untuk penilaian atas interkoneksi SIKD yang meliputi registrasi, status koneksi agen SIKD, dan penyampaian data.

RESUME PERHITUNGAN



No.	Uraian	2020	2021	Naik/Turun
1	Opini BPK WTP atas LKPD	443	475	↑ 7,22%
2	Penetapan Perda APBD Tepat Waktu	514	504	↓ -1,95%
3	e-budgeting	531	529	↓ -0,38%
4	e-procurement	531	524	↓ -1,32%
	Memenuhi Kriteria Utama	425	445	↑ 4,71%

No.	Uraian	2020	2021	Naik/Turun	Column1
1	Pagu DID	Rp 13.500 M	Rp 13.500 M	→ 0,00%	↑ 0%
2	Penerima Alokasi DID	416	426	↑ 2,40%	↓ 0%
3	Nilai Maksimum Perolehan DID	Rp 95,19 M	Rp 104,17 M	↑ 9,43%	↓ 0%
4	Nilai Minimum Perolehan DID	Rp 6,73 M	Rp 6,73 M	↑ -0,08%	↓ 0%
5	Rata-rata Perolehan DID	Rp 32,45 M	Rp 31,69 M	↓ -2,35%	↓ 0%

PENGGUNAAN DAN PENYALURAN

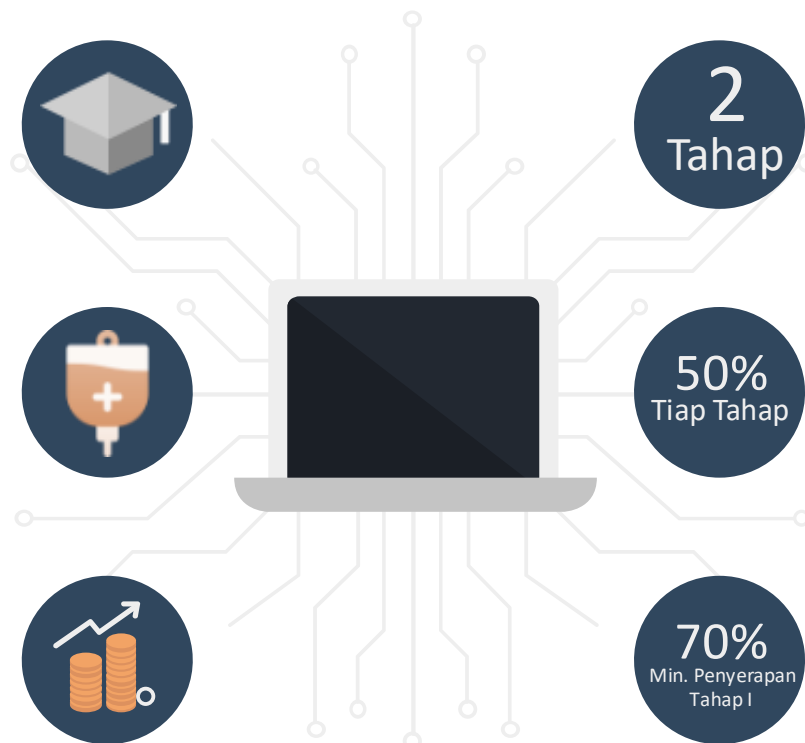


PMK 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 141/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Penggunaan

DID diprioritaskan untuk:

1. Bidang pendidikan dan kesehatan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
2. Pemulihan dan pemberdayaan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.



Penyaluran

- ❑ Penyaluran dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - Tahap I paling cepat bulan Februari (50%); dan
 - Tahap II paling cepat bulan Juli (50%).
- ❑ Persyaratan penyaluran DID antara lain:
 - Untuk Tahap I (paling lambat diterima DJPK tgl 20 Juni)
 - 1) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 - 2) Rencana penggunaan DID tahun berjalan; dan
 - 3) Laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya bagi daerah yang mendapatkan.
 - Untuk Tahap II (paling lambat diterima DJPK 20 November) dengan menyampaikan laporan realisasi penyerapan DID tahap I dengan penyerapan paling sedikit 70% dari dana yang diterima di RKUD
- ❑ Persyaratan penyaluran DID disusun dan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.



TERIMA KASIH



@DitjenPK



**direktorat jenderal
perimbangan keuangan**



ditjenpk



1500420

Whatsapp 085214087800

RESUME PERHITUNGAN PER KATEGORI (1)



No.	Kategori	Pagu per Kategori	% dari Pagu Total	Daerah Penerima				Alokasi Kinerja DID (Miliar Rp)		
				Prov	Kab.	Kota	Jumlah	Maks	Min	Rata-rata
Total		13.500,00		30	312	84	426	Rp104,17miliar	Rp6,73miliar	Rp31,69miliar
1	<i>Ekspor</i>	Rp643,77miliar	4,77%	7	61	17	85	Rp8,67miliar	Rp6,94miliar	Rp7,57miliar
2	<i>Peningkatan Investasi</i>	Rp613,48miliar	4,54%	6	63	12	81	Rp8,40miliar	Rp7,08miliar	Rp7,57miliar
3	<i>Kemandirian Daerah</i>	Rp943,81miliar	6,99%	4	60	17	81	Rp13,01miliar	Rp10,41miliar	Rp11,65miliar
4	<i>Kualitas Belanja Modal Kesehatan</i>	Rp696,79miliar	5,16%	7	66	19	92	Rp8,41miliar	Rp6,73miliar	Rp7,57miliar
5	<i>Kualitas Belanja Modal Pendidikan</i>	Rp742,23miliar	5,50%	5	73	20	98	Rp8,51miliar	Rp6,81miliar	Rp7,57miliar
6	<i>Persentase Penduduk Miskin</i>	Rp489,38miliar	3,63%	3	30	9	42	Rp13,94miliar	Rp11,15miliar	Rp11,65miliar
7	<i>IPM</i>	Rp513,85miliar	3,81%	4	37	8	49	Rp12,22miliar	Rp9,78miliar	Rp10,49miliar
8	<i>Tingkat Pengangguran Terbuka</i>	Rp745,73miliar	5,52%	4	49	11	64	Rp13,68miliar	Rp10,95miliar	Rp11,65miliar
9	<i>Angka Partisipasi Murni</i>	Rp643,19miliar	4,76%	6	52	11	69	Rp10,79miliar	Rp8,63miliar	Rp9,32miliar
10	<i>Peta Mutu Pendidikan</i>	Rp755,05miliar	5,59%	6	60	15	81	Rp10,71miliar	Rp8,57miliar	Rp9,32miliar
11	<i>Penanganan Stunting</i>	Rp969,45miliar	7,18%	7	77	20	104	Rp10,39miliar	Rp8,31miliar	Rp9,32miliar
12	<i>Persentase Balita Sudah Mendapatkan Imunisasi Lengkap</i>	Rp615,23miliar	4,56%	3	45	18	66	Rp10,83miliar	Rp8,67miliar	Rp9,32miliar
13	<i>Persentase Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan</i>	Rp531,33miliar	3,94%	1	33	23	57	Rp10,46miliar	Rp8,37miliar	Rp9,32miliar

RESUME PERHITUNGAN PER KATEGORI (2)



No.	Kategori	Pagu per Kategori	% dari Pagu Total	Daerah Penerima				Alokasi Kinerja DID (Miliar Rp)		
				Prov	Kab.	Kota	Jumlah	Maks	Min	Rata-rata
Total		13.500,00		30	312	84	426	Rp104,17miliar	Rp6,73miliar	Rp31,69miliar
14	<i>Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak</i>	Rp969,45miliar	7,18%	7	84	13	104	Rp10,73miliar	Rp8,58miliar	Rp9,32miliar
15	<i>Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak</i>	Rp577,94miliar	4,28%	3	45	14	62	Rp11,01miliar	Rp8,81miliar	Rp9,32miliar
16	<i>EKPPD</i>	Rp540,65miliar	4,00%	1	45	12	58	Rp10,73miliar	Rp8,58miliar	Rp9,32miliar
17	<i>SAKIP</i>	Rp633,87miliar	4,70%	4	52	12	68	Rp10,79miliar	Rp8,63miliar	Rp9,32miliar
18	<i>Indeks Pencegahan Korupsi</i>	Rp316,93miliar	2,35%	6	20	8	34	Rp10,69miliar	Rp8,55miliar	Rp9,32miliar
19	<i>Penghargaan Pembangunan Daerah</i>	Rp236,54miliar	1,75%	10	9	10	29	Rp8,67miliar	Rp6,66miliar	Rp8,16miliar
20	<i>Inovasi Daerah</i>	Rp212,07miliar	1,57%	5	12	9	26	Rp9,00miliar	Rp7,51miliar	Rp8,16miliar
21	<i>Inovasi Pelayanan Publik</i>	Rp285,47miliar	2,11%	7	20	8	35	Rp10,39miliar	Rp7,71miliar	Rp8,16miliar
22	<i>TPID Award</i>	Rp350,73miliar	2,60%	15	15	13	43	Rp9,85miliar	Rp5,39miliar	Rp8,16miliar
23	<i>SIKD</i>	Rp342,57miliar	2,54%	3	32	7	42	Rp8,35miliar	Rp7,93miliar	Rp8,16miliar
24	<i>Pengelolaan Sampah</i>	Rp130,50miliar	0,97%	2	6	8	16	Rp10,35miliar	Rp6,03miliar	Rp8,16miliar

DISTRIBUSI ALOKASI



Kalimantan	2020		2021	
	Daerah	Alokasi	Daerah	Alokasi
Kalbar	11	265	12	183
Kalteng	14	410	11	240
Kalsel	14	524	14	446
Kaltim	10	401	10	448
Kalut	4	103	6	227
Jumlah	53	1.703	53	1.544

Daerah Penerima Turun 0%
Alokasi Turun -159 Miliar

Sulawesi	2020		2021	
	Daerah	Alokasi	Daerah	Alokasi
Sulut	15	358	14	448
Gorontalo	7	150	6	240
Sulteng	9	310	13	370
Sulsel	18	455	20	537
Sulbar	6	131	5	97
Sultra	15	375	15	412
Jumlah	70	1.779	73	2.103

Daerah Penerima Naik 4%
Alokasi Naik 324 Miliar

Sumatera	2020		2021	
	Daerah	Alokasi	Daerah	Alokasi
Aceh	20	466	21	519
Sumut	15	402	16	447
Sumbar	18	394	18	455
Riau	13	385	12	329
Kepri	8	241	8	308
Jambi	11	249	12	262
Sumsel	18	387	15	341
Babel	4	146	6	239
Bengkulu	7	143	9	234
Lampung	14	371	12	276
Jumlah	128	3.183	129	3.410

Daerah Penerima Naik 1%
Alokasi Naik 227 Miliar

Jawa	2020		2021	
	Daerah	Alokasi	Daerah	Alokasi
Jakarta	1	56	1	43
Jabar	24	1.059	27	1.213
Banten	9	317	9	368
Jateng	35	1.710	35	1.199
Yogya	6	413	6	326
Jatim	36	1.464	37	1.506
Jumlah	111	5.020	115	4.656

Daerah Penerima Naik 4%
Alokasi Turun -364 Miliar

Bali dan Nusra	2020		2021	
	Daerah	Alokasi	Daerah	Alokasi
Bali	10	567	10	545
NTB	11	341	11	363
NTT	7	211	10	208
Jumlah	28	1.119	31	1.115

Daerah Penerima Naik 11%
Alokasi Turun -4 Miliar

Maluku dan Papua	2020		2021	
	Daerah	Alokasi	Daerah	Alokasi
Maluku	6	130	6	161
Maluku Utara	7	212	8	189
Papua	5	114	5	130
Papua Barat	8	239	6	192
Jumlah	26	696	25	671

Daerah Penerima Turun -4%
Alokasi Turun -24 Miliar